

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem pemerintahan Islam adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang dapat memberikan jalan keluar atas berbagai permasalahan kehidupan manusia karena manusia hanya diperbolehkan tunduk kepada hukum-hukum Allah SWT yang Maha Mengetahui ciptaan-Nya. Dengan sistem pemerintahan Islam, manusia mempunyai kekuasaan untuk memastikan agar sang pemimpin hanya menerapkan hukum Allah SWT secara *kaffah* dan tidak mengedepankan hawa nafsunya.<sup>1</sup>

Islam merupakan suatu ajaran yang kekal dan berkembang; kekal dalam prinsip-prinsip dan hukum-hukumnya dalam Al-Quran dan sunah yang sahih, dan tumbuh dalam hukum-hukumnya yang sekunder selama tidak terdapat penjelasan syariat yang sampai kepada kita.

---

<sup>1</sup>“Mengenal Sistem Pemerintahan Islam” <https://www.kompasiana.com/>, diakses pada 21 Jan. 2019, pukul 21.49 WIB.

Adapun bila terdapat di dalamnya hukum yang umum, maka hukum ini dapat dijadikan acuan untuk mewarnai suatu kondisi khusus dari berbagai macam keadaan. Disini sangat penting bagi kita untuk membicarakan tentang suatu pemikiran yang sedang aktual di antara kaum Muslim pada masa ini tentang perkembangan Islam dan bagaimana Islam semestinya. Mereka menganggap bahwa hukum-hukum Islam sendiri harus dikembangkan harus diubah sesuai dengan perjalanan kehidupan manusia agar hukum-hukum tersebut tidak tersingkirkan dari panggung kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Pemikiran Asad tentang politik dilatarbelakangi oleh keyakinannya bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna, lengkap dengan petunjuk yang mengatur semua urusan bagi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Di dalam Islam terdapat aturan masyarakat yang Islami, yang sesuai dengan tuntutan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Oleh karenanya, dalam bernegara kaum Muslimin dilarang

---

<sup>2</sup> Syahid Muhammad Bagir Shadr, *Ketika Keimanan Saja Tak Cukup*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h.72

meniru sistem Barat, tetapi ia memberikan peluang kepada kaum Muslimin untuk membuat sistem sendiri yang sesuai dengan kehendak sendiri, serta didasari atas kesepakatan bersama, yang diserahkan kepada kaum Muslimin untuk menentukan model atau bentuk pemerintahannya. Namun yang jelas menurut Muhammad Asad pemerintahan masa Al-Khulafa' al-Rasyidun merupakan contoh dari sistem bernegara dalam Islam.<sup>3</sup>

Sistem politik Islam adalah sistem universal dan tidak mengenal sekat-sekat dan ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan. Akan tetapi, ia diikat oleh tauhid yang dihubungkan keyakinan manusia secara keseluruhan. Menurut Asad, konsep kenegaraan Islam sendiri menurutnya bahwa bentuk kenegaraan Islam tidaklah satu model atau bentuk akan tetapi sangat banyak, seperti monarki, teokrasi, dan bahkan ada yang liberal. Akan tetapi, kedaulatan yang dimiliki oleh manusia itu harus dibatasi oleh norma-norma

---

<sup>3</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Polittik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, edisi ketiga (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 167

yang datangnya dari Tuhan. Selanjutnya, pemerintah hanya dibentuk oleh umat Islam dan merekalah yang menentukan dan mengaturnya. Dengan demikian, tidak ada klaim pribadi, golongan dan sebagainya, akan tetapi semuanya kesepakatan bersama umat Islam.<sup>4</sup>

Masyarakat yang bahagia adalah bersungguh-sungguh bersatu padu dari dalam dan memiliki kesepakatan dalam mengenai ‘apa yang benar dan apa yang salah’ dalam muamalat manusia serta bersefahaman mengenai satu kewajiban moral yang timbul dari satu hukum moral yang tetap dan mutlak. Jika perkara ini terlaksana, masyarakat itu bersatu atas dasar agama yakni bersatu atas paksi *tauhidullah*.<sup>5</sup>

Berbicara tentang masalah pemerintahan (kenegaraan) dalam perspektif Islam, ada aliran pendapat yang mengkaitkan antara Islam dengan kenegaraan.

---

<sup>4</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Polittik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer...*, h. 168

<sup>5</sup>Syahidah Akmal binti Abd Rahman, “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Muhammad Asad”, *Jurnal Kaedah pengajian usuluddin* ixgu 6121, h.

Kelompok yang menganggap bahwa Islam adalah Agama dan Negara. Paham ini secara institusi dimotori oleh kelompok Syi'ah, yang meanggap bahwa Agama dan Negara itu merupakan satu paket yang tak terpisahkan dan 'kiriman' Tuhan, sehingga pendirian sebuah Negara atau pemerintahan itu merupakan salah satu dan rukun iman, karena itu mereka meanggap bahwa mendirikan Negara atau pemerintahan itu adalah suatu kewajiban theologis.<sup>6</sup>

Pemerintah dan masyarakat saling bergandengan membentuk hala tuju negara dikehendaki di mana bangsa-bangsa yang memeluk agama Islam mempunyai pilihan bebas untuk menentukan nasib mereka sendiri dalam membentuk pembentukan pemerintahan Negara Islam sebaik-baiknya. Pelaksanaan pemerintahan Islam yang menjana keredhaan ilahi. Kewujudan negara Islam sejati yang melaksanakan dasar pemerintahan Islam berlandaskan ideologi al-Quran dan as-Sunnah tanpa mencampuri konsep

---

<sup>6</sup> E. Syibli Syarjaya dan B. Syafuri, *Pemikiran Politik dalam Islam*, (Lembaga Pejaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulan Hasanuddin Banten, 2014), h. 99-100

nasionalisme atau konsep ideologi modern berunsurkan *westernization* (pembaratan) di dalam struktur pemerintahan. Penerapan hukum-hukum Islam ke dalam struktur pemerintahan dan bersepadanan dalam memenuhi keperluan kini dapat mewujudkan sebuah negara Islamiah yang tegas bercirikan tatacara pemerintahan dan konstitusi berpendirian konkrit. Pengertian negara menurut pandangan Muhammad Asad adalah tanggungjawab yang dapat dipenuhi oleh satu badan yang mengatur, yang disertai memegang kekuasaan untuk memerintah (*amr*) kebaikan dan melarang (*nahi*).<sup>7</sup>

Menurut Asad tidak dapat disebut Negara Islam apabila *dustur asasiyah* (Undang-Undang Dasar) tidak berdasarkan hukum *syara* dalam berbagai masalah yang umum. Maksud dari masalah umum disini adalah persoalan-persoalan kehidupan sosial manusia yang berkaitan dengan

---

<sup>7</sup> Syahidah Akmal binti Abd Rahman, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Muhammad Asad", h. 2-3

hukum dan prinsip-prinsip yang berkenaan masalah kemasyarakatan.<sup>8</sup>

Muhammad Asad adalah salah seorang tokoh pemikir modern yang berpengaruh dan mempunyai otoritas tersendiri di kalangan intelektual Muslim. Ia sosok yang unik dan berbeda dari para mufassir pada umumnya. Ia lahir dalam tradisi dan alam pikiran orang Barat yang tentu saja berbeda dari alam pemikiran orang Timur secara keseluruhan. Asad menulis tafsirnya dalam bahasa Inggris. Keunikan lain dari Muhammad Asad adalah bahwa tidak sebagaimana para pakar Islam yang berasal dari Barat yang lain yang memahami Islam sebagai sebuah objek kajian intelektual ataupun fungsional saja, Muhammad Asad mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Muslim sejati yang mencoba memahami Islam secara komprehensif baik melalui pendekatan budaya maupun politik. Inilah yang menjadi ketertarikan peneliti bagi peneliti untuk mengkaji

---

<sup>8</sup> Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terjemahan dari buku *Minhaj al-Islam fi al-hukmi*, diterjemahkan oleh Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), cetakan ke-1, h. 65-66

penelitian yang berjudul “PEMIKIRAN POLITIK ISLAM  
MENURUT MUHAMMAD ASAD”

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk pemerintahan Islam menurut Muhammad Asad?
2. Bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan Islam menurut Muhammad Asad?
3. Bagaimana hubungan kekuasaan Eksekutif dan Legislatif menurut Muhammad Asad?
4. Bagaimana hubungan antara Pemerintah dengan Rakyat menurut Muhammad Asad?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemerintahan Islam menurut Muhammad Asad.



2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip pemerintahan Islam menurut Muhammad Asad.
3. Untuk mengetahui hubungan kekuasaan Eksekutif dan Legislatif menurut Muhammad Asad.
4. Untuk mengetahui hubungan antara Pemerintah dengan Rakyat menurut Muhammad Asad.

#### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber kajian tentang sistem pemerintahan Islam. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang politik Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manafaat praktis dalam penelitian ini ialah bermanfaat untuk bisa dikaji dan diteliti oleh lembaga yang

memiliki peran dalam pemerintahan, dan sebagai renungan pemerintah agar tidak salah dalam membuat kebijakan.

### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti, yaitu:

No	Judul skripsi	Penulis	Keterangan
1	Pengaruh Pemikiran Muhammad Asad Dalam Pembentukan Negara Islam: Studi Tentang Terbentuknya Negara Pakistan	Tadzkira Nadiya Tsauri / Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta / 2017	Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemikiran Muhammad Asad mengenai Sistem Negara dan pemerintahan sesuai konsep Islam dan dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana kontribusi

			pemikiran politik Muhammad Asad bagi terbentuknya Negara Pakistan.
2	Peranan Umar Bin Khattab Dalam Membangun Sistem Pemerintahan Islam	Mustakim / Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten / 2003	Penelitian ini untuk mengetahui konsep Umar Bin Khattab tentang pemerintahan dan untuk mengetahui peranan Umar Bin Khattab dalam membangun lembaga-lembaga pemerintahan serta dalam skripsi ini mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai kedua gagasan tersebut dalam konteks perkembangan politik Islam hubungannya

			dengan pemerintah di Indonesia.
3	Sistem Pemerintahan Islam Menurut Muhammad Asad	Mia Oktaviani / Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten / 2019	Sedangkan skripsi penulis yaitu tentang “Pemikiran politik Islam menurut Muhammad Asad”. Dalam skripsi ini penulis menganalisis bagaimana sistem pemerintah Islam dalam pemikiran tokoh Islam Muhammad Asad baik itu bentuk-bentuk pemerintahan Islam, prinsip-prinsip, hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif serta untuk mengetahui

			bagaimana hubungan antara rakyat dan pemerintahan.
--	--	--	--

Dari hasil penelitian terdahulu seperti pemaparan di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu Sistem Pemerintahan Islam. Akan tetapi penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Muhammad Asad memperhatikan konsepsi kehidupan umat Islam merupakan konsepsi kehidupan yang lebih damai dibandingkan dengan mode hidup yang tergesa-gesa dan mekanis seperti bangsa Eropa. Ketertarikan Muhammad Asad terhadap Islam membawanya kepada rasa simpati terhadap kemunduran umat Islam baginya kemunduran sosio-kultural Umat Islam dikarenakan kaum muslimin secara berangsur-angsur melalaikan jiwa ajaran-

ajaran dalam Islam. Islam masih ada pada diri umat muslim namun tinggal jasad tanpa jiwanya. Islam yang dahulunya dibangun kokoh berdiri tegak atas permulaan dasar agamawi kini Islam sendirilah yang menjadi sebab kelemahannya dan kelemahan itu melemahkan struktur kultural dan bahkan mungkin akan menyebabkan kemusnahan.<sup>9</sup>

Berpedoman terhadap Al-Qur'an, Sunah dan Ijtihad, Asad pada akhirnya memberikan gambaran secara terperinci mengenai konsep Negara Islam dan sistem pemerintahan Islam yang baik. Islam sangat mengedepankan moral sehingga Asad mengambil kesimpulan yang tercantum dalam Surat Ali-Imran ayat 103-104 sebagai tujuan Negara menurut Islam. Karena menurut Muhammad Asad inti dari Negara menurut Islam adalah menyiapkan perangkat politik bagi terwujudnya persatuan dan tolong menolong di kalangan masyarakat. Kedua ayat ini telah menjelaskan

---

<sup>9</sup> Tadzkira Nadiya Tsauri, *Pengaruh Pemikiran Muhammad Asad Dalam Pembentukan Negara Islam (Studi Tentang Terbentuknya Negara Pakistan)*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 6

bahwa masyarakat seharusnya mengamalkan kebijakan dan menghindarkan kebatilan dan dapat hidup sesuai dengan hukum fitrah dari Allah SWT.<sup>10</sup> Holanda, doktor berkebangsaan Inggris, merumuskan Negara sebagai kumpulan dari para individu yang tinggal disuatu wilayah tertentu yang bersedia tunduk pada kekuasaan mayoritas atau kekuasaan satu golongan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini sangat bermacam-macam antara lain; Presidensial, Parlementer, Semipresidensial, Komunis, Demokrasi liberal, dan liberal.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam* (Bandung: Pustaka, 1985), h. 59-50

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 130-131

<sup>12</sup> "Sistem pemerintahan" <https://id.wikipedia.org/wiki/> , diakses pada 21 Jan. 2019, pukul 21.32 WIB.

Para fuqaha (pemikir) Islam memberikan penekanan tentang model pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan peradaban Islam, terkait dengan proses pembentukan konstitusi sebuah pemerintahan terdapat lima hal penting; *pertama*, lembaga kekhalifahan diatur dengan tatacara pemilihan, namun pemilihan itu terbatas pada dewan pemilihan yang terdiri dari orang-orang dengan syarat-syarat berikut: Jujur, luas pengetahuan dan adil. *Kedua*, hak mengajukan pendapat tidak hanya dinikmati oleh penduduk ibukota, tetapi karena alasan praktis, secara tradisional khilafah dipilih di Ibukota. *Ketiga*, dibenarkan adanya pemilihan calon yang kurang memenuhi syarat meski ada calon lain yang memenuhinya. *Keempat*, terlepas dari proses pemilihan, seorang khalifah dapat dipilih dan dilantik karena ia ditunjuk oleh khalifah yang sedang berkuasa. Calon khalifah yang diunjuk itu dikenal dengan sebutan *Wali al-'Ahd*. *Kelima*, sekali dipilih dan dilantik, maka khalifah telah mengikat diri dengan umat melalui perjanjian yang



menjamin kesetiaan dalam memenuhi segenap tugas dan menerima janji setia kepatuhan secara timbal balik.<sup>13</sup>

Pemerintah yang memerintah atas nama Allah dan Rasulnya, harus menjalankan tanggung jawabnya atas perintah syar'i, memiliki hak untuk meminta rakyatnya apabila ia melibatkan kepentingan masyarakat dan keamanan Negara begitupun rakyat di bawah pemerintahannya wajib mematuhi segala perintahnya dan mereka harus bersedia mengorbankan seluruh miliknya, kesenangan, harta kekayaan termasuk juga nyawa mereka sendiri.<sup>14</sup>

Apabila pemerintahan yang dikendalikan oleh Islam berdasarkan hukum-hukum Allah, maka rakyat akan dapat hidup makmur dan tenang melaksanakan kewajiban keagamaannya. Kekuasaan yang dipegang oleh umat Islam eksistensi mereka dengan agamanya. Tidak benar jika umat Islam akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat

---

<sup>13</sup> Fatahullah Jurdi, *Politik Islam; Pegantar Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), h. 240

<sup>14</sup> Syahidah Akmal binti Abd Rahman, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Muhammad Asad", *Jurnal Kaedah pengajian usuluddin* ixgu 6121, h. 6

merugikan umat yang bukan Islam. Kekuasaan yang dijalankan oleh umat Islam berdasarkan wahyu ilahi, dan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama akan dapat membawa rakyatnya kepada kehidupan yang baik artinya fungsi antara yang religius dengan yang politis adalah sesuatu yang akan membawa kepada pembaharuan dan perubahan yang berarti dalam kehidupan masyarakat. Seorang pemimpin dalam Islam akan mempertanggungjawabkan segala hal kepada rakyat dan juga kepada Tuhannya.<sup>15</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Fatahullah Jurdi, *Politik Islam Pegantar Pemikiran Politik Islam....*, h. 242

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini sebagai berikut:

### a. Bentuk Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pustaka pengumpulan datanya di olah melalui penganalisaan dan penelusuran atas buku-buku, artikel, jurnal, website dan sumber-sumber lainnya yang dianggap dapat memecahkan masalah serta pencarian kebenaran dalam skripsi ini.

### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian ini tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data dalam bentuk kata dan kalimat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 9

## 2. Teknik pengumpulan data

Penulis dalam teknik pengumpulan data mengumpulkan, membaca dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat data primer, sekunder, dan tersier.

### a. Sumber data primer

Sumber data primer ini yaitu karya yang ditulis oleh Muhammad Asad itu sendiri dalam bukunya “ Minhaj al-Islam fi al-Hukmi” (Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam) dengan penterjemah Afif Muhammad dan buku “The Principles of State and Government in Islam” (Azas-Azas Negara Dan pemerintahan di dalam Islam).

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan penelitian yang berupa tulisan-tulisan ilmiah dibidangnya yang dapat memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai Sistem pemerintahan, negara, politik Islam, dll.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan dengan teknik konten analisis. Konten analisis atau analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi.<sup>17</sup> Dalam menganalisis data penulis mencermati dari berbagai narasi dan

---

<sup>17</sup> “Berkenalan dengan Analisis Isi” <https://andreyuris.wordpress.com/>, diakses pada 15 Mei. 2019, pukul 20.55 WIB.

pemikiran Muhammad Asad, tidak dipahami dari pemahaman tekstual tetapi juga dipahami dari pemahaman kontekstual.

#### 4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman

kepada:

- a. Pedoman Penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah UIN "SMH" Banten.
- b. Penulisan Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dari kamus besar Bahasa Indonesia.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang dikembangkan menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab kesatu, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka

Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematis Pembahasan.

Bab Kedua, Biografi Muhammad Asad, meliputi : Sejarah Kelahiran Muhammad Asad, Pendidikan Muhammad Asad, Karier dan Aktivitas Muhammad Asad, dan Karya-Karya Muhammad Asad.

Bab ketiga, Teori Tentang Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan, yang meliputi: Pengertian, Bentuk dan Tujuan Negara, Konsep, Pengertian dan Bentuk Sistem Pemerintahan, dan Rakyat dan Pemerintah.

Bab keempat, Analisis Pemikiran Muhammad Asad Tentang Sistem Pemerintahan Islam, yang meliputi: Bentuk-bentuk Pemerintahan Islam, Prinsip-prinsip Pemerintahan Islam, Hubungan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif, dan Pemerintah dan Rakyat.

Bab kelima, pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, dalam bab ini penulisan diberi kesempatan untuk memberi kesimpulan dan saran dari pada hasil penelitian yang diteliti dalam permasalahan yang di kaji.